

LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)
HASIL TEMUAN PENGAWASAN OLEH HAWASBID
TRIWULAN IV
PERIODE BULAN OKTOBER S/D DESEMBER 2023



PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS I.A

TAHUN 2023



**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)
HASIL TEMUAN HAKIM PENGAWAS BIDANG (HAWASBID)
PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS I.A
TRIWULAN IV
PERIODE OKTOBER S/D DESEMBER TAHUN 2023**

Berdasarkan Laporan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Bima Kelas I.A Triwulan IV (Periode Oktober s/d Desember 2023) tertanggal 20 Desember 2023, setelah dilakukan Rapat Monitoring dan Evaluasi (MONEV) pada tanggal 20 Desember 2023, maka berikut diuraikan hal-hal yang harus segera ditindak lanjuti dan dilakukan perbaikan terhadap hasil-hasil temuan tersebut beserta cara perbaikannya adalah sebagai berikut:

I. MANAJEMEN PERADILAN:

1. Kinerja lain yang berkaitan erat dengan manajemen peradilan;

Temuan:

Petugas pojok gugatan mandiri tidak standby di tempat layanan gugatan mandiri

Hasil Monitoring dan Evaluasi:

Pojok gugatan mandiri harus dimaksimalkan.

(Penanggung jawab pelaksana rekomendasi/perbaikan adalah Panmud Gugatan).

II. KINERJA PELAYANAN PUBLIK

1. Pelaksanaan Kinerja Antrian Sidang

Temuan:

Antrian sidang belum sepenuhnya memanfaatkan mesin antrian yang sudah disiapkan.

Hasil Monitoring dan Evaluasi:

Harus diadakan DDTK dan sosialisasi terkait mesin antrian sidang.

(Penanggung jawab pelaksana rekomendasi/perbaikan adalah Panitera).

III. ADMINISTRASI PERKARA

1. Pelaksanaan tata kelola lainnya yang masih berkaitan erat dengan administrasi perkara

Temuan:

Konsideran pada PMH perkara nomor 1633/Pdt.G/2023/PA.Bm dan 1907/Pdt.G/2023/PA.Bm belum ada.

Hasil Monitoring dan Evaluasi:

Pada PMH harus dimasukkan nomor SK Susunan Majelis yang terbaru.

(Penanggung jawab pelaksana rekomendasi/perbaikan adalah Panitera Sidang dan Hakim).

IV. ADMINISTRASI PERSIDANGAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN

1. Kinerja tata kelola lainnya yang masih berkaitan erat dengan pelaksanaan administrasi persidangan

Temuan 1:

Untuk blanko pernyataan para pihak tentang penjelasan mediasi masih terdapat kata penggugat/pemohon dan kata tergugat/ termohon tanpa dicoret salah satu.

Hasil Monitoring dan Evaluasi:

Panitera sidang atau Ketua Majelis harus memilih dan mencoret salah satu sesuai dengan jenis perkaranya.

(Penanggung jawab pelaksana rekomendasi/perbaikan adalah Panitera Sidang dan Ketua Majelis).

Temuan 2:

Pada perkara 1907/Pdt.G/2023/PA.Bm Mediator belum menandatangani dan melaporkan hasil mediasi

Hasil Monitoring dan Evaluasi:

Mediator harus selalu menandatangani dan melaporkan hasil mediasi.

(Penanggung jawab pelaksana rekomendasi/perbaikan adalah Mediator).

V. BIDANG ADMINISTRASI UMUM (KESEKRETARIATAN)

1. Bidang Perencanaan TI dan Pelaporan

Temuan:

CCTV tidak berfungsi

Hasil Monitoring dan Evaluasi:

Selalu memantau CCTV dan segera memperbaiki system jaringan

(Penanggung jawab pelaksana rekomendasi/perbaikan adalah Kasubbag TI melalui Staf Pelaksana).

2. Bidang Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana

Temuan:

KGB pegawai terlambat

Hasil Monitoring dan Evaluasi:

Segera diselesaikan usulan KGB pegawai

(Penanggung jawab pelaksana rekomendasi/perbaikan adalah Kasubbag Kepegawaian dan Ortala melalui Staf Pelaksana).

3. Bidang Umum dan Keuangan

Temuan:

Daftar Barang Ruangan (DBR) belum diupdate.

Hasil Monitoring dan Evaluasi:

Segera mengupdate semua DBR yang ada di semua ruangan

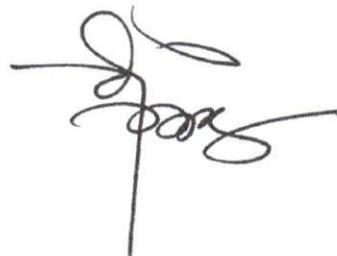
(Penanggung jawab pelaksana rekomendasi/perbaikan adalah Kasubbag Umum dan Keuangan melalui Staf Pelaksana).

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Temuan Hakim Pengawas Bidang di Pengadilan Agama Bima Kelas I.A Triwulan IV Periode Oktober s/d Desember 2023 ini disusun. Terhadap berbagai temuan yang dilakukan MONEV di atas dan direkomendasikan untuk segera dilakukan tindak lanjut perbaikan, maka kepada seluruh pihak-pihak (Pejabat) yang terkait harus segera menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan dalam waktu paling lama (paling lambat) 2 (dua) pekan setelah tanggal Laporan MONEV ini dibuat.

Semoga laporan ini dapat dijadikan bahan periksa untuk pelaksanaan kegiatan dan program Pengadilan Agama Bima selanjutnya.

Bima, 20 Desember 2023

Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima



H. Ihyaddin, S.Ag., M.H.

NIP. 196904171999031003

BAB II
HASIL PENGAWASAN

A. BIDANG MANAJEMEN PERADILAN

Meliputi sub kinerja:

- a. Pelaksanaan Tatakelola Manajemen Peradilan;
- b. Program Kerja dan Pencapaian Target Indikator Kinerja;
- c. Pelaksanaan Tatakelola Program Akreditasi Penjaminan Mutu;
- d. Pelaksanaan Tatakelola Program Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas;
- e. Kinerja lain yang berkaitan erat dengan manajemen peradilan
- f. Pengawasan dan Pembinaannya;
- g. Tindaklanjut Evaluasi dan Hambatan Pelaksanaanya;

NO	KONDISI	KRITERIA	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI
1	Petugas pojok gugatan mandiri tidak <i>standby</i> di tempat layanan gugatan mandiri	Petugas harus <i>standby</i> di pojok gugatan mandiri	Petugas gugatan mandiri rangkap pekerjaan	Pelayanan kurang maksimal	Pojok gugatan mandiri harus dimaksimalkan

B. BIDANG KINERJA PELAYANAN PUBLIK

Meliputi sub kinerja;

- a. Pelaksanaan Kinerja Penjaga Keamanan;
- b. Pelaksanaan Kinerja Layanan dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- c. Pelaksanaan Kinerja Antrian Sidang;
- d. Pelaksanaan Kinerja Layanan Resepsionis,
- e. Pengadaan dan Pemeliharaan Inventaris yang Menunjang Pelayanan Publik;
- f. Tingkat Ketertiban, Kedisiplinan, Ketaatan, Kebersihan dan Kerapian dalam pelayanan publik
- g. Kinerja lain yang berkaitan erat dengan pelayanan publik.

NO	KONDISI	KRITERIA	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI
1.	Antrian sidang belum sepenuhnya memanfaatkan mesin antrian yang sudah disiapkan	Keputusan Dirjen Badilag. Mahkamah Agung RI No. 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama	Kurangnya pemahannya petugas dalam menggunakan mesin antrian	Antrian sidang tidak teratur	Harus diadakan DDTK dan sosialisasi terkait mesin antrian sidang

C. BIDANG ADMINISTRASI PERKARA

Meliputi sub kinerja:

- a. Pelaksanaan tatakelola Prosedur penerimaan perkara.
- b. Pelaksanaan tata kelola pencatatan dan pengarsipan dokumen administrasi penerimaan perkara pada layanan Meja Penerimaan (PTSP), baik yang bersifat manual maupun yang dilakukan melalui elektronik dalam aplikasi SIPP;
- c. Pelaksanaan tata kelola administrasi pencatatan dan penginputan dalam pembukuan register, jurnal dan buku-buku lainnya, termasuk tata kelola pelaporan Keuangan Perkara, Biaya Proses dan PNBP baik secara manual terlebih-lebih dalam aplikasi yang telah disediakan (SIPP, e-Register, e-Kuangan, e-PNBP (PNBP Fungsional), dll.);
- d. Pelaksanaan tata kelola pengarsipan perkara, baik yang dilakukan secara manual maupun aplikasi SIPP dan e-Court,
- e. Pelaksanaan Tata Kelola Pelaporan perkara;
- f. Kinerja tata kelola lainnya yang masih berkaitan erat dengan administrasi perkara.

NO	KONDISI	KRITERIA	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI
1.	Konsideran pada PMH perkara nomor 1633/Pdt.G/2023/PA.Bm dan 1907/Pdt.G/2023/PA.Bm belum ada.	Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktoral Jenderal Peradilan Agama Tahun 2014	Petugas masih menggunakan format yang lama	Dasar hukum dalam PMH kurang jelas	Pada PMH harus dimasukkan nomor SK Susunan Majelis yang terbaru.

D. BIDANG ADMINISTRASI PERSIDANGAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN

Meliputi sub kinerja:

- a. Sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim;
- b. Pelaksanaan tata kelola persidangan, baik mulai dari persiapan, pelaksanaan dan pasca sidang dilaksanakan;
- c. Pelaksanaan tata kelola dokumen-dokumen hasil pelaksanaan persidangan suatu perkara (dokumen dalam berkas perkara),
- d. Pelaksanaan tata kelola minutasi dan apload dokumen perkara dalam aplikasi SIPP,
- e. Kinerja administrasi dan penyelesaian pelaksanaan putusan (eksekusi);
- f. Kinerja tata kelola lainnya yang masih berkaitan erat dengan pelaksanaan administrasi persidangan.

NO	KONDISI	KRITERIA	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI
1.	Untuk blanko pernyataan para pihak tentang penjelasan mediasi masih terdapat kata penggugat/pemohon dan kata tergugat/termohon tanpa dicoret salah satu.	Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktoral Jenderal Peradilan Agama Tahun 2014	Ketidakteitian dari Panitera Sidang dan Ketua Majelis	Kedudukan pihak tidak jelas.	Panitera sidang atau Ketua Majelis harus memilih dan mencoret salah satu sesuai dengan jenis perkaranya.

NO	KONDISI	KRITERIA	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI
2	Pada perkara 1907/Pdt.G/2023/PA.Bm Mediator belum menandatangani dan melaporkan hasil mediasi	Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Peradilan Agama Tahun 2014	Ketidakteitian Mediator	Tidak ada laporan meiasi	Mediator harus selalu menandatangani dan melaporkan hasil mediasi

E. BIDANG ADMINISTRASI UMUM (KESEKRETARIATAN)

Bidang Administrasi Umum (Kesekretariatan), meliputi:

- Pelaksanaan sub layanan kinerja bidang Perencanaan, TI dan Pelaporan;
- Pelaksanaan sub layanan kinerja bidang Kepegawaian dan ORTALA;
- Pelaksanaan sub layanan kinerja bidang Umum dan Keuangan, termasuk tata kelola administrasi keuangan DIPA.

NO	KONDISI	KRITERIA	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI
Bidang Perencanaan TI dan Pelaporan					
1.	CCTV tidak	Seharusnya CCTV berfungsi 24 jam untuk	Jaringan internet	Tidak maksimalnya monitoring kondisi	Selalu memantau CCTV dan segera

NO	KONDISI	KRITERIA	SEBAB	AKIBAT	REKOMENDASI
	berfungsi	memudahkan monitoring	terganggu	kantor	memperbaiki system jaringan
Bidang Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana					
1.	KGB pegawai terlambat	Seharusnya usulan KGB sudah dibuat 2 bulan sebelum kenaikan KGB	Kurang koordinasi antara subbagian kepegawaian dengan PPABP PA Bima	Pembayaran KGB terlambat	Segera diselesaikan usulan KGB pegawai
Bidang Umum dan Keuangan					
1.	Daftar Barang Ruangan (DBR) belum diupdate.	Seharusnya DBR diupdate setiap triwulan	Kelalaian petugas dalam melaksanakan tugas update DBR	Daftar barang ruangan tidak sesuai dengan kondisi rill	Segera mengupdate semua DBR yang ada di semua ruangan

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Berdasarkan tabel temuan pengawasan di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja Pengadilan Agama Bima dari kelima aspek pengawasan pada Triwulan IV Tahun 2023 telah berjalan dengan baik. Hal-hal yang menjadi temuan tersebut sebagian disebabkan karena kurangnya koordinasi dan pemahaman pelaksana atas sistem kerja yang kedepan harus dilakukan perbaikan.

B. REKOMENDASI

1. Ketelitian dan kecermatan dalam melaksanakan tugas perlu lebih diperhatikan, salah satunya dengan *check* dan *recheck* hasil kerja;
2. Diperlukan koordinasi yang baik antar bagian, antar sub layanan kepaniteraan dan kesekretariatan, maupun lintas sub antara sub kepaniteraan dengan kesekretariatan sehingga setiap kinerja dan layanan masing-masing mencapai sub bagian terlaksana dengan maksimal;
3. Terhadap setiap temuan agar dilakukan monitoring dan evaluasi sehingga rekomendasi perbaikan yang disampaikan Tim dapat telaksana perbaikannya secara benar, tepat dan maksimal.

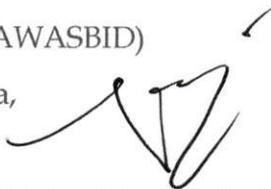
Bima, 20 Desember 2023

Tim Hakim Pengawas Bidang (HAWASBID)

Pengadilan Agama Bima,

1. Abubakar, S.H.

(*Hakim Pengawas Bidang Manajemen Peradilan*)



(.....)

2. Hj. Khafidatul Amanah S.H., M.H. (.....)
(Hakim Pengawasan Bidang Kinerja Pelayanan Publik)

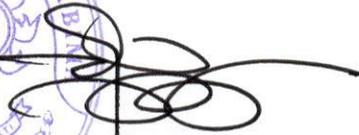
3. Uswatun Hasanah, S.H.I. (.....)
(Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara)

4. Solatiah, S.H.I. (.....)
(Hakim Pengawas Bidang Administrasi Kesekretariatan)

Mengetahui,

Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima
Koordinator Pengawasan,




H. Ihyaddin, S.Ag., M.H.
NIP. 196904171999031003

LAPORAN

HASIL TINDAK LANJUT PERBAIKAN MONITORING DAN EVALUASI
TEMUAN PENGAWASAN OLEH HAWASBID
TRIWULAN IV TAHUN 2023
(PERIODE BULAN OKTOBER s.d DESEMBER 2023)



PENGADILAN AGAMA BIMA KELAS I.A

TAHUN 2023

HASIL TINDAK LANJUT PERBAIKAN MONITORING DAN EVALUASI
TEMUAN PENGAWASAN OLEH HAWASBID PENGADILAN AGAMA
BIMA KELAS I.A
TRIWULAN IV TAHUN 2023
(PERIODE OKTOBER s.d DESEMBER TAHUN 2023)

Berdasarkan Laporan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Bima Kelas I.A Triwulan IV Tahun 2023 (Periode Oktober s/d Desember 2023) tertanggal 20 Desember 2023 dan Kontrak Kinerja Permintaan Perbaikan tertanggal 20 Desember 2023, berikut disampaikan laporan hasil tindak lanjut perbaikan terhadap hasil-hasil temuan HAWASBID Triwulan IV Tahun 2023 sebagaimana termuat dalam Laporan MONEV Temuan Hawasbid dengan rincian laporan sebagai berikut:

I. BIDANG MANAJEMEN PERADILAN:

1. Kinerja lain yang berkaitan erat dengan manajemen peradilan;

Temuan:

Petugas pojok gugatan mandiri tidak *standby* di tempat layanan gugatan mandiri

Hasil Monitoring dan Evaluasi:

Pojok gugatan mandiri harus dimaksimalkan.

Eviden perbaikan:

(<https://drive.google.com/file/d/1uw8ItVwcANVxTgXtYmy9TJf2cgD5pqG1/view?usp=sharing>)

(Status temuan: *close*).

II. KINERJA PELAYANAN PUBLIK

1. Pelaksanaan Kinerja Antrian Sidang

Temuan:

Antrian sidang belum sepenuhnya memanfaatkan mesin antrian yang sudah disiapkan.

Hasil Monitoring dan Evaluasi:

Harus diadakan DDTK dan sosialisasi terkait mesin antrian sidang.

Eviden perbaikan:

(https://drive.google.com/file/d/18A34DwnWF_FZYrg2Zir5Wc06K3y9EtSL/view?usp=drive_link)

(Status temuan: *Close*).

III. ADMINISTRASI PERKARA

1. Kinerja tata kelola lainnya yang masih berkaitan erat dengan administrasi perkara

Temuan:

Konsideran pada PMH perkara nomor 1633/Pdt.G/2023/PA.Bm dan 1907/Pdt.G/2023/PA.Bm belum ada.

Hasil Monitoring dan Evaluasi:

Pada PMH harus dimasukkan nomor SK Susunan Majelis yang terbaru.

Eviden perbaikan:

https://drive.google.com/file/d/1TMajORbbseATG-wZJLxDHebFGs7cs4FT/view?usp=drive_link

(Status temuan: *Close*).

IV. ADMINISTRASI PERSIDANGAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN

1. Kinerja tata kelola lainnya yang masih berkaitan erat dengan pelaksanaan administrasi persidangan

Temuan 1:

Untuk blanko pernyataan para pihak tentang penjelasan mediasi masih terdapat kata penggugat/pemohon dan kata tergugat/ termohon tanpa dicoret salah satu.

Hasil Monitoring dan Evaluasi:

Panitera sidang atau Ketua Majelis harus memilih dan mencoret salah satu sesuai dengan jenis perkaranya.

Eviden perbaikan:

https://drive.google.com/file/d/1o9YLZXXSM84p-uG2z3sMhjGIWRPcyLal/view?usp=drive_link

(Status Temuan: *Close*).

Temuan 2:

Pada perkara 1907/Pdt.G/2023/PA.Bm Mediator belum menandatangani dan melaporkan hasil mediasi

Hasil Monitoring dan Evaluasi:

Mediator harus selalu menandatangani dan melaporkan hasil mediasi.

Eviden perbaikan:

https://drive.google.com/file/d/1Ap9UWlRkFd31bHkfxXodBdHse4T-gt8R/view?usp=drive_link

(Status Temuan: *Close*).

V. BIDANG ADMINISTRASI UMUM (KESEKRETARIATAN)

A. Bidang Perencanaan TI dan Pelaporan

Temuan:

CCTV online tidak berfungsi

Hasil Monitoring dan Evaluasi:

Selalu memantau CCTV dan segera memperbaiki system jaringan

Eviden perbaikan:

<https://drive.google.com/drive/folders/16sbhVTmAdFpj6VZTXhrS7aFALMLJwB9c?usp=sharing>

(Status Temuan; *Close*).

B. Bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana

Temuan:

KGB pegawai terlambat

Hasil Monitoring dan Evaluasi:

Segera diselesaikan usulan KGB pegawai

Eviden perbaikan:

https://drive.google.com/drive/folders/15v-Q-Kakl9lWa4kvSzT7AtT9z5MPkD_l?usp=sharing

(Status Temuan; *Close*).

C. Bidang Umum dan keuangan

Temuan:

Daftar Barang Ruangan (DBR) belum diupdate.

Hasil Monitoring dan Evaluasi:

Segera mengupdate semua DBR yang ada di semua ruangan

Eviden perbaikan:

<https://drive.google.com/drive/folders/16FuF7dmGaw4636ioQzxsXZo-2w6ycf17?usp=sharing>

(Status Temuan; *Close*).

Demikian Laporan Tindak Lanjut Perbaikan Hasil Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Temuan Hakim Pengawas Bidang di Pengadilan Agama Bima Kelas 1A Triwulan IV Tahun 2023 (Periode Oktober s/d Desember 2023) ini disusun.

Pengadilan Agama Bima Kelas I.A

Dari uraian laporan di atas dapat disimpulkan seluruh temuan telah selesai 100% ditindaklanjuti oleh masing-masing penanggung jawab.

Berdasarkan seluruh hasil temuan dan tindaklanjut tersebut, dihimbau kepada seluruh pihak (Pejabat dan Pelaksana) agar melaksanakan kinerjanya dengan baik dan cermat agar ke depan temuan sebagaimana yang telah ditindaklanjuti tersebut tidak terulang kembali. Hasil tindaklanjut ini juga diharapkan menjadi bahan periksa untuk penetapan langkah dan program Pengadilan Agama Bima selanjutnya.

Bima, 29 Desember 2023

Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima



H. Ihyaddin, S.Ag., M.H.

NIP. 196904171999031003